

KONFLIK DAN INTEGRASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KOTA BEKASI

Adon Nasrullah Jamaludin

(FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, adon.nasrullah@yahoo.co.id)

Abstract:

Every religion teaches brotherhood, and do not want hostility. But in reality, in the midst of public life, religion often appears as a force that can lead to conflict. One of the conflicts that often occur between religious communities in the context of the establishment of houses of worship. The conflict became one of the motives and trigger strife and anarchy among religious communities, especially in Bekasi. His case is very varied, ranging from the issue of the establishment of a new house of worship until revocation of a license by the Municipal Government. But the case of the establishment of houses of worship there, Kota Bekasi has a unique case, which is the area of the conflict (rejection) and other areas that occur integration (reception). What is interesting and at the same time become the focus of this paper are the factors causing the emergence of the phenomenon of conflict (rejection) in urban areas (urban), and the phenomenon of integration (reception) in the village (rural), especially in the context of the establishment of houses of worship. Based on data obtained that both have each contributing factor both internal and external.

Keywords: Conflict; Integration; Religious People; House of worship

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap agama mengajarkan perdamaian, persaudaraan, serta kerukunan,¹ dan tidak menghendaki perpecahan dan permusuhan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya.² Tetapi dalam kenyataannya, menunjukkan bahwa pengaruh agama terhadap masyarakat sering menimbulkan konflik. Bahkan isu-isu keagamaan sering menjadikan timbulnya perang, keyakinan dalam suatu agama sering menimbulkan sikap manusia yang tidak toleran, loyalitas dalam agama hanya dapat menyatukan beberapa orang saja dan memisahkan dari kebanyakan orang lainnya.³

Oleh karena itu konflik bernuansa agama kerap mewarnai hubungan antar umat beragama di masyarakat. Sejak reformasi tahun 1998, konflik antar umat beragama di Indonesia semakin menunjukkan intensitasnya.⁴ Disinyalir bahwa konflik itu berasal dari tendensi politis yang masuk pada masalah agama.⁵ Salah satu potensi konflik yang seringkali terjadi antar umat beragama umumnya berawal dari posisi mayoritas. Jika dilihat dari kuantitas penganut agama, maka akan terlihat ada agama yang tergolong dalam kelompok mayoritas dan agama yang termasuk dalam kelompok minoritas. Perbedaan yang cukup signifikan antara

¹ Jalaludin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1986), h. 36.

² Afif Muhammad tentang "Kerukunan Beragama Pada Era Globalisasi", Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ke-29, Tanggal 8 April 1997, h. 1 dan juga dalam buku *Agama dan Konflik Sosial*, (Bandung: ISRC, 2011), h.iii. Dan Johan Effendi, "Dialog Antar Umat Beragama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan", *Prisma*, No.5, (Juni), 1978, LP3ES, Jakarta, h.13.

³ Thomas F. O'Dea, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h.139.

⁴ Lihat Departemen Agama RI. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), h. 2.

⁵ Rahman, M. Taufiq. "Pluralisme Politik." *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 34.1 (2010): 1-13.

golongan mayoritas dan minoritas ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama.

Salah satu konflik yang kerap terjadi antara mayoritas dan minoritas adalah masalah izin pendirian rumah ibadah. Permasalahan tentang pendirian rumah ibadah merupakan salah satu motif dari berbagai tindakan anarkis yang dilakukan atas dasar agama yang mengatasnamakan kuantitas dari penganut agama tertentu. Agama-agama yang tergolong minoritas kerap kali mendapatkan hambatan untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah mereka, diantaranya ketentuan tentang pembangunan rumah ibadah.

Konflik yang disebabkan persoalan rumah ibadah merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan sarana ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam mengungkapkan haknya dalam beragama. Bahkan terkadang pendirian rumah ibadah, sering memunculkan logika ancaman yang begitu besar. Artinya setiap pendirian rumah ibadah, maka yang terlintas di benaknya adalah ancaman bahaya. Jika mayoritas muslim, maka muslim akan terancam dengan munculnya bangunan agama Kristen (gereja). Sebaliknya, jika Kristen mayoritas seperti di Papua, maka mereka akan terancam dengan bangunan agama Islam (mesjid), demikian juga di Bali kalau muncul masjid, maka umat Hindu sebagai mayoritas akan merasa terusik. Sehingga di setiap daerah selalu mengatakan betapa sulitnya mendirikan rumah ibadah sebagai warga minoritas. Hingga isu yang muncul ke permukaan adanya kecurigaan terhadap misi agama tertentu dalam

mendirikan tempat ibadah tidak dapat dinafikan.⁶

Oleh karena itu paradigma pendirian rumah ibadah harus dikembalikan kepada sikap keberagaman (baik pola pemahaman maupun wawasan keagamaan) masing-masing agama.⁷ Jika agama dipahami secara sempit dan tidak toleran terhadap agama lain, maka agama seringkali diperlakukan secara subyektif. Berkaitan dengan itu, dimungkinkan akan muncul *fanatisme* keagamaan yang berlebihan sehingga tidak ada lagi peluang untuk toleransi, dan *prejudice* yang menganggap agama lain rendah dan tidak pantas untuk diberikan apresiasi. Kedua hal ini jika terus dikembangkan maka konflik semakin terbuka diantara pemeluk agama yang berbeda.

Untuk wilayah Jawa Barat, kasus penutupan tempat ibadah menjadi kasus yang paling seksi (menghebohkan). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal izin pendirian rumah ibadah.⁸ Kota Bekasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, merupakan salah satu daerah Jawa Barat pada beberapa waktu terakhir banyak menimbulkan konflik pendirian rumah ibadah. Ada beberapa persoalan cukup serius dihadapi Kota Bekasi kaitannya dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya (1) Pembangunan rumah ibadah baru berserta perizinannya; (2) Penggunaan fasilitas umum seperti rumah, ruko, lapangan dijadikan tempat rumah ibadah dan kebaktian; (3) Protes lingkungan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah; (4) Pencabutan izin pendirian gereja oleh Kepala Daerah (Walikota). Gereja-gereja tersebut telah memiliki izin, namun atas desakan kelompok agama lain, kemudian pejabat pemerintah mencabut izinnya.⁹

⁶ Lihat Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan, Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen Dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 88

⁷ Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis*, (Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), h. 1

⁸ Ahmad Suaedy, *Op.Cit.*, h. 8-9

⁹ H. Abdul Manan (Ketua FKUB Kota Bekasi), Hasil Wawancara: Kota Bekasi, 15 Agustus 2015,

menjelaskan bahwa kasus proses pendirian rumah ibadah disamping faktor daerah, juga diakibatkan menyalahinya (tidak mematuhi) peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 tahun 2006, (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006.

Sejak beberapa tahun terakhir, setidaknya ada 12 kasus yang menimbulkan konflik dalam kasus pendirian rumah ibadah.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan,¹¹ secara garis besar kasus yang bermunculan dari pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi dapat berupa rumah tempat tinggal dijadikan kebaktian, ruko, hingga izin pendirian gereja baru. Kasus-kasus tersebut hingga saat ini masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah sebetulnya sudah berupaya mengatur tata prosedur pendirian rumah ibadah. Sejak tahun 1969 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam SKB No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya.¹²

Tetapi SKB yang dikeluarkan itu memiliki beberapa kendala, salah satunya masih dirasa cukup memojokkan bagi kaum minoritas, terlebih umat Kristen-Katolik yang memiliki banyak sekte, aturan ini dianggap sangat membatasi. Bagi umat Islam yang kebetulan secara komposisi minoritas pada wilayah lain, juga terkena dampak yang menyulitkan dari SKB ini. Hingga pada prakteknya sangat multitafsir seperti siapa yang disebut sebagai pemerintah daerah, siapa yang disebut sebagai pejabat pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu, dan siapa yang disebut sebagai organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.¹³

Untuk meredam pro dan kontra tentang SKB tahun 1969 di atas, pemerintah

mengeluarkan kembali tanggal 21 Maret 2006 satu kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Keberadaan regulasi yang baru, diharapkan mampu menjebatani dan mencegah potensi konflik yang ditimbulkan dari pendirian rumah ibadah. Tetapi pada kenyataannya, SKB atau istilah lainnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) tahun 2006 yang baru, tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan aksi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah.¹⁴

Keberadaan PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 di Kota Bekasi, nampaknya semakin mempertajam konflik antar umat beragama. Ada kecenderungan tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat (PBM No. 8 dan 9 tahun 2006) dan pemerintah kota (Peraturan Wali Kota Bekasi No. 16 tahun 2006) seperti arogan, penipuan tanda tangan persetujuan, ketidakjujuran panitia dan lainnya oleh pihak-pihak yang bersikukuh mendirikan rumah ibadah.¹⁵

Kondisi ini, telah memunculkan konflik horizontal antar umat beragama di Kota Bekasi. Beberapa organisasi Islam seperti Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB), FUI Kota Bekasi, Forum Anti Gerakan Pemurtadan (FAKTA), Gerakan Pemuda Islam, Forum Umat Islam Mustika

¹⁰ Bahkan kasus-kasus tersebut gaungnya cukup terasa untuk beberapa waktu lamanya. "Bagaikan api dalam sekam", demikian tulis Badruzzaman Busyairi, dalam *Rumah Ibadah di Kota Bekasi*, (Kota Bekasi: Penerbit FKUB, 2009), h. 140.

¹¹ H. Abdul Manan, (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi), Hasil Wawancara: Kota Bekasi, 15 Agustus 2016. Juga lihat dalam Badruzzaman Busyairi, *ibid*, h. 139-140.

¹² Rumadi, *Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara*, (prolog) dalam Ahmad Suaedy, *Politikasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu*

Penting di Indonesia, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 10-11.

¹³ Kustini, *Efektifitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2009), h. 2.

¹⁴ Ahmad Suaedy, *Op.Cit.*, h. 20

¹⁵ Makalah Ibnu Hasan Mughtar, "Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 di Kota Bekasi", *Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni*, Vol. IX, (Juli-September), 2010, h. 110.

Jaya (FUIM), serta Porum Silaturahmi Masjid-Mushola se-Kota Bekasi serta masyarakat Kota Bekasi melakukan penolakan keras terhadap kasus tersebut yang memicu timbulnya bentrok antar warga.

Menariknya konflik (penolakan) berada pada wilayah perkotaan (*urban society*) dan integrasi (penerimaan, harmoni) berada pada wilayah perkampungan (*rural society*). Wilayah Kota Bekasi, jika dipetakan ada empat tipologi wilayah yang memiliki karakteristiknya masing-masing, seperti wilayah perkampungan; wilayah perumahan; wilayah pusat perdagangan dan bisnis; serta wilayah kombinasi dari ke tiga wilayah.¹⁶ Artinya Kota Bekasi satu sisi masih terdapat wilayah perkampungan dan pada sisi lainnya terdapat wilayah perkotaan (pusat perdagangan dan jasa).¹⁷

Tiga wilayah di atas (perumahan, pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, serta kombinasi wilayah), memiliki intensitas dinamika kehidupan umat beragama yang kompleks. Hampir disetiap tiga wilayah tersebut, memiliki tempat ibadah serta penganut agama yang beragam. Bahkan maraknya pertumbuhan perumahan di Kota Bekasi seperti Regency, Pondok Pekayon Indah, Wisma Asry, Pondok Timur Indah Kota Bekasi dan lainnya telah menjadi lahan subur bagi pertumbuhan agama Kristen sekaligus pendirian rumah ibadah gereja-gereja.¹⁸

Tiga wilayah tersebut (perumahan, pusat kegiatan ekonomi dan bisnis serta kombinasi wilayah) memiliki perkembangan masyarakat yang sangat majemuk (*plural societies*). Timbulnya keberagaman (*diversity*) atau multikultural seperti kelas sosial (strata), kesukuan, keagamaan, kultur,

adat istiadat, bahasa, gender, etnik dan lainnya, menjadi ciri khas wilayah ini. Hal ini memperkuat pernyataan Nasikun,¹⁹ yang menjelaskan bahwa masyarakat majemuk, di dalamnya akan terkandung berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang adat istiadat, budaya, agama dan kepentingan; atau suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lainnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan kasus pendirian rumah ibadah di atas. Fokusnya adalah mengapa wilayah integrasi (penerimaan) berada pada masyarakat bertipologi perkampungan (*rural society*) dengan karakteristiknya lebih homogen, norma dan adat istiadat sangat kuat, serta pemahaman tentang keberagaman masih tradisional, formal dan tertutup. Bahkan keberagaman (*religiusitas*) masyarakat perkampungan memiliki sensitifitas beragama sangat tinggi. Mereka akan menentang dan menolak jika ada agama yang berbeda serta ajaran yang tidak sepaham dengan komunitasnya. Serta menolak terhadap hal-hal baru yang tidak sesuai dengan norma, adat dan budaya masyarakat setempatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Elizabeth Nottingham,²⁰ bahwa tipe masyarakat model ini adalah memiliki penganut agama yang sama, nilai-nilai agama menjadi sistem nilai masyarakat secara mutlak, serta perubahan sulit terjadi disebabkan kekuatan adat dan tradisi. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan bergesernya sensitifitas keagamaan pada masyarakat perkampungan tersebut?

¹⁶ Andi Sopandi, "Identifikasi Pola dan Strategi Peningkatan Integrasi Masyarakat di Kota Bekasi", *Jurnal Madani*, Edisi II, (Nopember), 2006, h. 64-65.

¹⁷ Sebagai salah satu wilayah urban, Kota Bekasi memiliki kapasitas penduduk yang sangat kompleks. kompleksitas Kota Bekasi sebagai daerah urban, diantaranya: Homogeneitas kehidupan daerah semakin berkurang dan cenderung heterogen; Beragamnya agama dan tempat ibadah didaerah urban; Berubahnya pola hidup dan sistem sosial masyarakat; Perubahan tata guna lahan dan lahan

semakin menyempit; dan Tingkat kepadatan penduduk tinggi.

¹⁸ Makalah Kustini, "Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi", *Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni*, Vol. X, No. 4 (Oktober-Desember), 2011, h. 939.

¹⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 31.

²⁰ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 51-53.

Sebaliknya mengapa wilayah konflik (penolakan) berada pada masyarakat bertipologi perkotaan (*urban society*) dengan karakteristiknya lebih heterogen, terbuka, serta norma dan budaya sangat beragam.²¹ Karakteristik keberagaman (*religiusitas*) masyarakat kota, kebalikan dengan masyarakat perkampungan di atas. Perubahan sosial yang terjadi, menyebabkan terjadinya sekularisasi dalam kehidupan beragama (cara pandangan hidup yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama), pemahaman atau persepsi masyarakat yang telah mengalami pergeseran bahkan perubahan (kalau dahulu agama dipahami sebagai sumber moral, etika, dan norma hidup serta menjadi motif dari seluruh kegiatan hidupnya, namun sekarang motif tersebut sudah dikacaukan oleh yang lain (modernisme-materialisme).²² Tapi kebalikannya mengapa sensitifitas beragama lebih tinggi, apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran ini?

Untuk kepentingan tulisan ini, penulis mengambil sampel dua kasus di atas, yaitu untuk daerah konflik (penolakan) penulis mengambil daerah Ciketing Asem Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Daerah ini masyarakatnya cukup heterogen, akibat banyaknya pendatang ke wilayah tersebut.²³ Penduduknya pun sangat beragam (majemuk), baik suku seperti suku Betawi, Sunda, Batak, Jawa, Maluku, Irian, NTT dan lainnya, juga dari agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Begitu pula dari sisi pekerjaan, ada pegawai, karyawan, pedagang dan bisnis.

Sedangkan untuk daerah integrasi (menerima, harmoni) penulis mengambil daerah Kampung Sawah Kelurahan Jatimurni

Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Daerah ini memiliki kerukunan beragama yang kondusif. Kementerian Agama RI menjadikan daerah ini sebagai model daerah binaan Kerukunan Umat Beragama. Daerah ini telah menunjukkan harmonisasi dan berkerukunan antar pemeluk umat beragama. Jika melihat teori di atas, daerah ini seharusnya sangat rentan dengan konflik kaitannya dengan pendirian rumah ibadah, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Tulisan ini ingin mengungkap lebih jauh tentang kedua kasus diatas, antara penolakan dan penerimaan pendirian rumah ibadah gereja di Ciketing Asem dan Kampung Sawah Kota Bekasi.

II. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis penelitian ini memfokuskan analisisnya pada gejala-gejala sosial yang terjadi kaitannya dengan pendirian rumah ibadah. Orientasi analisisnya difokuskan pada tiga komponen yaitu, *place* (tempat, dimana peristiwa itu terjadi), *actor* (pelaku, orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut), dan *activities* (kegiatan dalam peristiwa tersebut). Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah dimulai dari menentukan metode, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data, dan diakhiri dengan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Integrasi (Penerimaan) Dalam Pendirian Rumah Ibadah

1. Kondisi Lokasi

²¹ Alex Inkeles, *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1980), h. 87-99. Inkeles menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat kota yang telah menjadi manusia modern, diantaranya: Terbuka terhadap pengalaman baru dan berkeinginan terhadap sesuatu yang baru; Memiliki sikap yang independen terhadap berbagai bentuk; Sangat percaya terhadap ilmu pengetahuan sehingga mampu menundukan alam; Memiliki orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi; Selalu memiliki rencana jangka panjang dan; Selalu aktif terlibat dalam percaturan politik.

²² Elizabeth Nottingham, *Op.Cit.*, h. 54-65.

²³ Fenomena munculnya masyarakat pendatang (migrasi penduduk) pada daerah disekitar kawasan industri dan pusat perkotaan merupakan fenomena sosial yang kompleks. Salah satunya adalah kehadiran masyarakat pendatang menjadi titik awal terjadinya persinggungan antara budaya lokal, agama dan nilai-nilai budaya yang baru, masuk tidak terelakan bersama dengan arus industrialisasi dan modernisasi. Safari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 62.

Letak Kelurahan Jatimurni berada dipinggir Kota Bekasi. Daerah ini masih memiliki ruang penghijauan dan lahan pertanian cukup luas. Dari data yang ada ruang terbuka hijau cukup tinggi. Suasana yang sejuk, adem, rindang dengan pepohonan memperkuat ciri khas sebagai daerah perkampungan. Orang sekitar menyebutnya sebagai daerah “udik” (daerah yang subur dan penghasil bumi seperti padi, palawija, buah-buahan, sayuran serta ikan.

Oleh karena itu, berdasarkan tipologi wilayah Kota Bekasi, Jatimurni termasuk kategori wilayah perkampungan, dengan karakteristiknya: *Pertama*. Pemukiman penduduk belum padat (masih jarang). Dari empat kelurahan yang ada di Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatimurni merupakan dua dari Kelurahan yang paling sedikit penduduknya. Kelurahan Jatimurni memang masih banyak didominasi oleh penduduk asli warga setempat (Betawi). Sehingga tingkat kekerabatan (*genealogis*), di antara mereka masih sangat tinggi. Secara kasat mata penulis melihat persebaran bangunan perumahan penduduk atau masyarakat antara satu rumah dengan rumah sebelahnya pada umumnya rumah-rumah yang masih mempunyai hubungan secara keluarga atau kerabat. Tetangga mereka tidak lain adalah sanak keluarganya sendiri. *Kedua*. Pekerjaan (penghasilan) disektor perdagangan, pertanian sebagai tani, buruh, ngojog dan wiraswasta lainnya. Masih sedikit yang bekerja di bidang jasa dan perkantoran. *Ketiga*. Masih menggunakan bahasa, adat dan budaya (tradisi) asli Betawi. Hanya sedikit yang sudah bercampur. *Keempat*. Pendidikan rata-rata SD, SMP dan SMA. Sebagian kecil yang diploma dan sarjana (Profil Kelurahan Jatimurni).

Salah satu RW yang ada di Kelurahan Jatimurni adalah Kampung Sawah. Mengapa dinamai “Kampung Sawah”? kampung” secara bahasa berarti desa atau dusun yang berada di perkotaan, yang hidupnya sangat bersahaja. Sedangkan “sawah” adalah tempat

bercocok tanam. Jika digabungkan kampung sawah adalah kampung yang dikelilingi areal pesawahan. Jenis tanaman yang dihasilkannya seperti padi, buah-buahan serta peternakan ayam, kambing dan sapi.

Kampung Sawah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan perkampungan dengan gejala uniknya dalam konteks budaya Betawi. Ini adalah Kampung Betawi pertama yang warganya memiliki keragaman agama. Pluralitas yang dimiliki Kampung sawah memiliki daya tarik sendiri, sehingga masyarakat Kampung Sawah dapat disebut sebagai Indonesia kecil tentang kerukunan antar umat beragama yang dibalut dengan sikapnya yang terbuka, toleran dan saling menjaga keutuhan di antara mereka. Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negeri yang mempunyai penduduk beragama yang sangat plural, yang terjadi dari sejarah yang berabad-abad.²⁴

2. Deskripsi Integrasi di Kampung Sawah

Salah satu pemandangan yang menarik pada masyarakat Kampung sawah adalah sulitnya membedakan mana orang Islam dan mana orang Kristen, sebab mereka bersatu tanpa membedakan identitas agama. Fenomena ini dianggap sebagai gejala yang sedikit “menyimpang” dari kelaziman warga betawi yang identik dengan Islamnya.

Kampung Sawah dikenal menjadi area segi tiga emas yaitu Islam, Katolik dan Protestan. Ketiga agama tersebut bersatu dalam kehidupan masyarakat Kampung Sawah. Masing-masing berjalan dalam bingkainya masing-masing. Tidak ada ancaman, kebringasan, perseteruan bahkan kelompok mayoritas-minoritas di antara mereka. Kehidupan berjalan secara alami layaknya dalam satu keluarga besar.

Sejarah telah mengikat kohesifitas keluarga-keluarga mereka. Orang Kristen dan Islam di Kampung Sawah adalah keluarga yang satu dengan yang lain masih terikat hubungan persaudaraan. Jika diruntut satu dengan yang lainnya, mereka berasal

²⁴ Rahman, Taufiq. "Indianization of Indonesia in an Historical Sketch." *International Journal of Nusantara Islam* 1.2 (2013): 56-64.

dari keturunan yang sama baik dari pihak kakek maupun nenek. Istilah mereka “berasal dari satu pu’un”. Jika digambarkan bahwa Kohesi komunitas keluarga-keluarga di Kampung Sawah seperti gambar telur yang dibalut oleh 4 lapisan yaitu (1). Hubungan darah, (2). Tinggal di lokasi yang sama, (3). Umumnya beragama Islam, Protestan dan Katolik, dan (4). Etnis Betawinya masih kental.

Sejak abad 19 (sekitar Tahun 1896) agama Kristen Katolik mulai berkembang di Kampung Sawah. Bahkan benih Kristian (Kristen Protestan), telah ada sejak tahun 1851. Hingga saat ini ke dua agama tersebut telah tumbuh kurang lebih 117 tahun lamanya. Oleh karena itu, rumah ibadah disamping mesjid banyak dijumpai di Kampung sawah. Dalam satu kelurahan, gereja ada 12 buah dan mesjid ada 7 buah. Terbanyak adalah di Kampung Sawah, gereja ada 9 buah dan mesjid ada 7 buah. Bahkan dalam satu RT yang ada di Kampung Sawah jumlah gereja ada 3 buah dan Mesjid 1 buah. Pendirian rumah ibadah nyaris tidak ada kendala, disaat beberapa pendirian rumah ibadah di Kota Bekasi mendapat reaksi keras dari warga sekitarnya. Menariknya bangunan rumah ibadah tersebut saling berdekatan. Tiga rumah ibadah saling berdampingan yang masing-masing berjarak kurang lebih 300 meter, yaitu Gereja Katolik Santo Servatius, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kampung Sawah dan mesjid besar Yasfi (Yayasan dan Pondok Pesantren Fisabilillah).

Bukan itu saja, integrasi keberagaman Kampung Sawah, dibuktikan pula dengan tempat pemakaman umum yang saling berdampingan antara makam muslim dan Kristen. Ada 3 buah pemakaman yang di dalamnya bercampur, yaitu TPU Islam, TPU Kristen dan TPU masyarakat umum, di antaranya TPU GKP Kristen, TPU Protestan, TPU Katolik, TPU Islam, TPU Kecapi, dan TPU Darma Asih Jaya.

Hal lainnya yang menarik adalah tentang keluarga multikultural. Di Kampung

Sawah akan dijumpai dalam satu keluarga atau satu keturunan memiliki ragam pemeluk agama baik Islam maupun Kristen. Mereka bersaudara walaupun beda agama. Penulis mengambil beberapa sampel berkaitan dengan keluarga multikultural. Keluarga Bapak Manuel Boeng Napiun. Kakek dan neneknya beragama Kristen Katolik. Anak-anak dan cucunya ada yang beragama Islam, Kristen juga Hindu. Bahkan keluarga Bapak Manuel Boeng Napiun sendiri, memiliki ragam agama. Anaknya ada yang Kristen Protestan dan ada yang Islam bahkan sudah naik haji.²⁵

Kemudian keluarga Bapak Nasa. Sekarang beliau adalah Ketua RW 02 Kampung Sawah. Disamping sebagai Ketua RW 02, beliau juga merupakan salah satu tokoh masyarakat Kampung Sawah. Keluarga Bapak Nasa terdapat beberapa agama yang dipeluk oleh keluarganya yaitu agama Islam dan Kristen. Hal ini terjadi karena Neneknya beragama Islam sedangkan Kakeknya beragama Kristen. Selanjutnya perbedaan agama ini sangat berpengaruh terhadap keturunan beliau. Pak Nasa merupakan anak yang ke dua dari sembilan bersaudara. Beliau memeluk agama Islam mengikuti jejak Neneknya sedangkan sebagian dari saudaranya memeluk agama Kristen mengikuti Kakeknya. Di keluarga beliau tidak ada saling ejek, menghina hingga permusuhan. Justru yang ada adalah saling mengisi, menghormati dan mendukung sehingga terjadi kerukunan antar mereka.

Begitu juga yang dialami oleh Keluarga Bapak Musa Dani. Beliau adalah marga dari Dani, dan salah satu tokoh Agama Kristen. Bahkan beliau merupakan salah seorang yang dituakan (sesepuh) Kampung Sawah karena beliau adalah salah satu orang yang masih ada dan tahu secara percis mengenai sejarah Kampung Sawah. Keluarga bapak Musa Dani memiliki beberapa agama. Beliau mempunyai enam orang anak. Dari enam orang anak tersebut beliau mempunyai dua menantu yang beragama Islam, dan

²⁵ Manuel Boeng Napiun (Keturunan Napiun, pensiunan Kepala Sekolah dan Warga Kampung

Sawah), Hasil Wawancara: Kelurahan Jatimurni Kota Bekasi, 15 September 2016.

hanya satu orang yang masuk agama Islam. Sedangkan yang lima tetap memeluk agama Kristen mengikuti beliau. Sama halnya dengan pak Nasa di atas, keluarga Bapak Musa Dani pun yang beragama Kristen, tidak pernah memperlakukan sama siapa dan apa agamanya pada saat anaknya akan menikah, yang penting baginya adalah masih dalam Kampung Sawah dan dilandasai suka sama suka.

Terakhir tokoh masyarakat dan agama, KH. Rahmadin Afif, pengasuh Pondok Pesantren Fisabilillah (Yasfi). Saudara sepupu beliau beragama Kristen (adik ibunya seorang Protestan). Bahkan sepupunya itu menjadi tokoh Protestan dan Katolik. Bahkan Kakek beliau masih ada hubungan keluarga dengan kakek Musa Dani (72 Tahun), sesepuh Protestan. Persaudaraan mereka tidak terganggu dengan cara berbeda agama ini. Justru yang ada saling mengisi dan menjaga. Misalnya pada saat lebaran sudah biasa saling kirim rantang berisi makanan dengan mereka, bahkan saling silaturahmi. Begitupun dengan keluarga yang lain yang ada di Kampung Sawah, saya masih terikat keturunan.²⁶

Kehidupan masyarakat antara Islam-Kristen sangat harmonis, saling rukun dan terjaga. Kebersamaan sangat nampak dibalut dengan nilai persaudaraan yang tinggi. Integrasi yang terjadi antar mereka terikat oleh tali ikatan darah (keturunan), tempat saling berdekatan dan memiliki persepsi dan kepentingan (tujuan) yang sama sehingga terjaga keutuhan komunitasnya.

3. Faktor Penyebab Integrasi di Kampung Sawah

Melihat gambaran harmonisasi (kerukunan) antar umat beragama dalam hal ini agama Islam, Katolik dan Protsetan yang ada di Kampung Sawah sulit dipercaya, tetapi begitulah realitasnya yang terjadi. Kondisi demikian tidak lepas dari beberapa faktor pendukungnya. Penulis melihat ada faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan

yang membentuk hubungan dan kesatuan sosial bagi masyarakat yang berada di Kampung Sawah. Juga faktor internal yang tumbuh dari anggota masyarakatnya. Hasil penelitian penulis, membuktikan bahwa faktor agama namapaknya tidak menjadi penentu terjadinya integrasi yang ada di Kampung Sawah. Tetapi lebih disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti *faktor internal* (Sistem Kekerabatan Kampung Sawah; Pelestarian Budaya Betawi; dan Tumbuhnya Sikap Toleransi Antar Warga) dan *faktor eksternal* (Persamaan Kepentingan; Sistem Sosial-Budaya; Upacara Siklus Hidup; Sistem Perekonomian; dan Efektifitas Komunikasi (Interaksi Sosial)).

B. Konflik (Penolakan) Dalam Pendirian Rumah Ibadah

1. Kondisi Lokasi

Kelurahan Mustika Jaya letaknya berada dipinggir jalan raya serta bersebelahan dengan Kecamatan Mustika Jaya. Wilayah ini sangat potensial sebagai tempat pemukiman, sehingga dalam tata ruang Kota Bekasi, Kelurahan Mustika Jaya dijadikan sebagai kawasan pemukiman, kawasan jasa dan perdagangan serta kawasan TPU. Berbeda dengan Kampung Sawah di atas, daerah ini sangat panas sebab ruang terbuka hijau habis oleh bangunan perumahan.

Oleh karena itu, berdasarkan tipologi wilayah Kota Bekasi, Mustika Jaya termasuk kategori wilayah perumahan, jasa dan perdagangan (perkotaan), dengan karakteristiknya: *Pertama*. Pemukiman padat berubah menjadi kawasan perumahan, perkantoran, jasa dan perdagangan. Penduduk sudah heterogen (bercampur dengan pendatang). *Kedua*. Pekerjaan (penghasilan) umumnya disektor jasa dan perdagangan seperti dikantoran, karyawan pabrik, PNS, dan dagang dipertokoan besar. *Ketiga*. Terjadi polarisasi dimasyarakat seperti suku, budaya dan agama. Budaya

²⁶ Bapak KH. Rahmadin Afif (Tokoh Agama Islam Kampung Sawah), Hasil Wawancara: Kelurahan Jatimurni-Kota Bekasi, 15 Agustus 2016.

Betawi sudah mulai hilang, berganti dengan budaya campur (pendatang).

Ciketing Asem merupakan salah satu RW yang ada di Kelurahan Mustika Jaya. Sekitar tahun 1980-an wilayah ini merupakan areal persawahan yang subur. Sebagian besar para penduduk asli bermata pencaharian sebagai petani dan peternakan. Jumlah rumah pun tidak sebanyak seperti sekarang, sehingga jarak antar rumah cukup jauh. Pola hubungan sosial antara masyarakat masih terjalin dengan baik. Begitupun ikatan sosial masyarakat di daerah waktu itu, tergolong sangat erat dan baik dengan pola interaksi yang cenderung bersifat sosial dan tradisional.

Tetapi Sekitar Tahun 1989, *developer* perumahan mulai masuk wilayah Ciketing Asem Mustika Jaya, terutama untuk pembangunan kawasan perumahan. Tahap demi tahap *developer* membeli lahan yang ada di wilayah Ciketing Asem Mustika Jaya, untuk untuk dijadikan perumahan. Salah satunya adalah perumahan Pondok Timur Indah (PTI). Tetapi tidak semua wilayah dijadikan perumahan. Masih ada wilayah di Ciketing yang masih di huni oleh warga asli penduduk setempat. Sekitar tahun 1990-an mulai masuk para pendatang ke wilayah tersebut. Ada yang bermaksud mengontrak, membeli rumah hingga pindah dan menetap di daerah tersebut. Pertambahan komposisi jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya, sehingga dalam beberapa tahun sudah terasa dipadati oleh warga pendatang.

Oleh karena itu, penulis melihat ada dua corak utama kehidupan masyarakat Ciketing Asem Kelurahan Mustika Jaya, yaitu *Pertama*. Ada masyarakat asli daerah Ciketing Asem Mustika Jaya yang dikelompokkan sebagai masyarakat masih kuat dengan adat tradisionalnya, mentalitasnya masih perkampungan (*agraris*) sehingga kuat dalam menjalankan budayanya. *Kedua*. Masyarakat pendatang yang diklasifikasikan sebagai masyarakat mentalitas kota bertempat tinggal rata-rata di

perumahan. Mereka biasanya mengkonsentrasikan bidang pekerjaannya di institusi pemerintahan dan swasta, baik sebagai pegawai, pedagang, penyedia jasa dan sebagainya. Para pendatang ini sudah banyak yang beralih kepada budaya kota dan budaya lokal yang mereka bawa dari daerah asalnya semakin terkikis.

Ciketing Asem Kelurahan Mustika Jaya Kota Bekasi, adalah gambaran masyarakat model prismatic sebagaimana diungkapkan oleh Riggs. Masyarakat prismatic adalah masyarakat campuran antara nilai tradisional dan proses modernisasi, dimana terjadi tumpang tindih (*overlapping*) diantara kedua nilai tersebut.²⁷ Masyarakat prismatic, lanjut Riggs, memang masyarakat yang berada pada dunia ketiga (Negara-negara berkembang) seperti halnya Indonesia. Dalam sebuah prisma, digambarkan jika ada cahaya masuk, maka cahaya yang memusat adalah dikiaskan sebagai masyarakat tradisional, tetapi cahaya yang sudah memencar adalah dikiaskan sebagai masyarakat modern. Artinya masyarakat tradisional masih memegang kuat adat tradisi lamanya (masih memusat) dan masyarakat modern sudah mulai hilang atau ditinggalkan atau bercampur serta berbabur antara adat lama dengan perkembangan zaman (telah memencar).

Riggs menggambarkan bahwa masyarakat prismatic adalah masyarakat yang berada ditengah-tengah pada perkembangan tipologi masyarakat. Berawal dari masyarakat tradisional, kemudian masyarakat transisi dan terakhir masyarakat modern (kota). Masyarakat prismatic (transisi) berada ditengah-tengah. Artinya karakter masyarakat ini perpaduan antara sifat masyarakat kampung (tradisional) dengan sifat masyarakat kota (modern). Riggs menyebutnya sebagai masyarakat bersifat "*polynormative*", yaitu masyarakat pluralis. Artinya masyarakat ini tidak berbau secara homogen, tetapi memiliki

²⁷ Lihat dalam Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 35.

heterogenitas yang cukup tinggi. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Karakteristik Masyarakat Tradisional, Transisi, dan Kota

Masyarakat Kampung (Tradisional)	Masyarakat Prismatic (Transisi)	Masyarakat Kota (Modern)
Afektifitas	Berada dalam skala diantara masyarakat keduanya (Masyarakat Ciketing Asem)	Netralitas Afektif
Orientasi Diri		Orientasi Kolektifitas
Partikularisme		Universalisme
Askripsi		Prestasi
Spesifitas		Kekaburan

Oleh karena itu pada kasus penelitian ini, dua kelompok masyarakat di atas (warga asli dan perumahan) interaksi mereka tergolong intens karena pada kenyataannya keduanya saling membutuhkan. Tetapi komunikasi mereka bersifat fungsional. Artinya komunikasi itu dilakukan jika ada kebutuhan. Pada kenyataannya sifat individual mulai sangat nampak di antara mereka. Karena keduanya berbeda baik pada sisi tempat dan budayanya. Maka ketika kasus pendirian rumah ibadah HKBP, sebetulnya warga perumahan tidak menjadi masalah sebab hal itu bagian dari kehidupan masyarakat yang heterogen (kota atau perumahan). Justru yang memicu konflik adalah warga asli Ciketing Mustika Jaya yang masih ada dipinggir perumahan tersebut.

2. Deskripsi Konflik di Ciketing Asem

Perkembangan agama Kristen di Ciketing Asem dimulai tahun 1990-an. Percis pada saat daerah tersebut berubah dari agraris menjadi wilayah perumahan. Banyaknya pendatang yang masuk ke wilayah tersebut menjadi titik awal terjadinya persinggungan antara budaya lokal, agama dan nilai-nilai budaya baru dalam masyarakat.

Salah satunya adalah Kristen HKBP yang menghuni perumahan di Ciketing Asem sekitar tahun 1990-an. Sehingga lebih dikenal dengan HKBP Pondok Timur Indah (PTI). Pada awalnya tidak ada gejolak dari masyarakat, sebab proses penyebarannya

secara tertutup dan diam-diam. Mereka mengajak antar warga yang kebetulan beragama Kristen HKBP yang ada di perumahan PTI.

Awalnya jemaat HKBP ini berjumlah 10 keluarga, yang merupakan komunitas Suku Batak yang tinggal di perumahan Pondok Timur Indah (PTI) Ciketing Asem. Kemudian tahun 1995 anggota jemaat Kristen HKBP ini berkembang hingga 30 keluarga. Karena terus bertambah anggotanya, maka pada 13 Juni 1997 Ephorus selaku pucuk pimpinan Kristen HKBP melalui Surat Keputusan No.330/L05/VI/1997 menetapkan jemaat HKBP Pondok Timur Indah resmi menjadi jemaat penuh di HKBP. Kemudian pada tahun 2005 anggota jemaat Kristen HKBP semakin berkembang mencapai 150 keluarga. Hingga sekarang terus bertambah, mencapai 300-an keluarga yang menjadi anggota jemaat Kristen HKBP.

Karena sudah mulai banyak, akhirnya Kristen HKBP bermaksud mendirikan rumah ibadah. Selama kurun waktu itu, pihak jemaat Kristen HKBP sudah tiga kali secara resmi mengajukan izin pembangunan gereja ke Pemerintah Kota setempat, masing-masing pada 1995, 2005, dan terakhir 2010 (kemudian menimbulkan bentrok warga setempat). Sambil menunggu izin sebab selama ini mereka beribadah tidak menetap, dari rumah ke rumah anggota jemaat secara bergantian di perumahan Pondok Timur Indah Kota Bekasi. Waktu itu, protes warga masih sangat kecil bahkan hampir tidak ada, karena memang banyak warga yang kurang mengetahui aktifitas mereka. Lambat laun aktifitas kebaktian Kristen HKBP diketahui warga juga, mulailah protes warga sekitar bermunculan. Itupun masih bersifat temporal (sewaktu-waktu), sebab warga satu dengan lainnya belum terkoordinasi, hanya protes orang perorangan.

Puncaknya tahun 2010 aktivitas mereka mulai diketahui banyak warga sekitar, akhirnya dilaporkan ke aparat Pemerintah Kota, kemudian rumah tersebut disegel oleh Pemkot Bekasi pada 1 Maret 2010. Alasannya, menyalahi aturan penggunaan

rumah tinggal, bukan untuk tempat ibadah. Hingga sekitar tanggal 12 September 2010 puncak amarah warga tak terbendung, terjadilah baku hantam serta pengeroyokan antara jemaat HKBP dengan umat Islam setempat. Kasus ini melahirkan “insiden Ciketing”. Jemaat HKBP Hasian Sihombing tertusuk perutnya dan pemukulan terhadap Pendeta Luspida serta beberapa korban luka warga muslim.

3. Faktor Penyebab Konflik di Ciketing Asem

Berdasarkan fakta di lapangan, konflik yang terjadi di Ciketing Asem, tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor pendukung yang memicu terjadinya konflik tersebut. Hasil penelitian penulis, membuktikan bahwa tingginya sensitifitas keagamaan yang dapat memicu konflik pada dasarnya lebih karena beberapa faktor di luar substansi keberagaman, seperti *faktor internal* (Sengketa Tanah, dan Pelanggaran Terhadap PBM No.8 dan 9 Tahun 2006 dan Aturan Walikota Bekasi No.16 Tahun 2006) dan *faktor eksternal* (Perbedaan Kepentingan; Multitafsir Aturan PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006; dan Perbedaan Individu (Etnis dan Budaya).

IV. KESIMPULAN

Disintegrasi keagamaan pada dasarnya tidak didasarkan pada perbedaan nilai-nilai substantif agama itu sendiri. Perbedaan (heterogenitas) yang dibangun atas dasar percampuran (kemajemukan) antara pendatang dan pribumi dalam waktu relatif pendek, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Ciketing Asem Mustika Jaya Kota Bekasi, telah membuat sulitnya membangun sistem sosial yang ajeg (kuat). Sebab secara sosiologis masyarakat baru khususnya yang menghuni perumahan-perumahan baru telah berimplikasi pada tumbuhnya nilai-nilai dan norma baru, yang mendorong terjadinya perbedaan pandangan (persepsi) dan kepentingan. Gesekan-gesekan identitas yang menjadi ciri penting masing-masing kelompok telah berkontribusi secara signifikan terhadap peluang pecahnya

konflik dalam pluralitas masyarakat beragama. Selain itu, kuatnya faktor kepentingan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya sensitifitas keagamaan yang pada gilirannya memudahkan pecahnya konflik antarpemeluk agama, karena masing-masing kelompok (baik Islam maupun Kristen) berusaha memperjuangkan kepentingannya yang berbeda-beda sehingga benturan pun tak dapat dihindarkan.

Integrasi dalam pluralitas beragama dapat terbentuk, salah satunya, melalui proses budaya yang dapat memperkuat kohesifitas sosial dalam struktur masyarakat yang cenderung homogen. Kesamaan (homogenitas) yang dibangun atas dasar pertalian perkawinan dan kesatuan garis keturunan (*unilineal descent associations*) dalam rentang waktu yang lama telah ditunjukkan oleh masyarakat Kampung Sawah Jatimurni Kota Bekasi, sehingga menjadi entitas yang saling melekat dan menyatu. Kondisi inilah yang menjadikan anggota masyarakat lebih mudah membangun sistem sosial dan budaya yang harmoni yang didasarkan atas persepsi dan kepentingan yang sama. Pola dan proses ini telah melahirkan sejumlah kesamaan-kesamaan nilai dalam kehidupan masyarakat Kamung Sawah, sehingga mendorong pemahaman dan pandangan yang sama dan menggeser kekuatan sensitifitas agama yang dapat menghambat integrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Busyairi, Badruzzaman. 2009. dalam *Rumah Ibadah di Kota Bekasi*. Kota Bekasi: Penerbit FKUB.
- Daya, Burhanuddin. 2004. *Agama Dialogis*. Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya.
- Departemen Agama RI. 2003. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.
- Effendi, Johan. 1978. *Dialog Antar Umat Beragama, Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan*. *Prisma*, No.5,

- (Juni). Jakarta: LP3ES.
- Imam Asy'ari, Safari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Inkeles, Alex. 1980. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kustini. "Interaksi Antar Kelompok Pemeluk Agama Pada Masyarakat Urban: Studi Kasus di Kota Bekasi", *Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni*, Vol. X, No. 4 (Oktober-Desember), 2011.
- Kustini. 2009. *Efektifitas Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI.
- Muchtar, Ibnu Hasan. "Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 di Kota Bekasi", *Jurnal Multikultural dan Multireligius Harmoni*, Vol. IX, (Juli-September), 2010.
- Muhammad, Afif Muhammad. 2011. *Agama dan Konflik Sosial*. Bandung: ISRCP.
- Nasikun. 1986. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nottingham, Elizabeth K. 1996. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- O'Dea, Thomas F. 1987. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, M. Taufiq. "Pluralisme Politik." *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 34.1 (2010): 1-13.
- Rahman, Taufiq. "'Indianization' of Indonesia in an Historical Sketch." *International Journal of Nusantara Islam* 1.2 (2013): 56-64.
- Rakhmat, Jalaludin. 1986. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Sanusi, Ahmad. 1999. *Agama di Tengah Kemiskinan, Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen Dalam Perspektif Kerjasama Antar Umat Beragama*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Soelaiman, Munandar. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sopandi, Andi. "Identifikasi Pola dan Strategi Peningkatan Integrasi Masyarakat di Kota Bekasi", *Jurnal Madani*, Edisi II, (Nopember), 2006.
- Suaedy, Ahmad. 2007. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal; Beberapa Isu Penting di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.